

## ANALISIS PASAR TENAGA KERJA DI SUMATERA SELATAN<sup>1)</sup>

Oleh : Yunisvita<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

This research is used to analyze condition of labor market in South Sumatera in 1995 and 2003 and also its prediction in 2005-2010. It began with the analysis of demand for labor on the sector, in here it is differentiated into two sectors, they are agriculture sector and non-agriculture sector. The development of economic that happens in South Sumatera until 2003 is not followed by the transformation of demand for labor. It is indicated by some matters, they are: the dominance of labor needed in agriculture sector, the education level which is still low, and the sum of Blue collar labor proportion is also above 50 percent. While if we see from supply of labor available for elementary school below, it decreases in 2003 compared with in 1995. Based on the age, supply of labor is dominated by the labor 25-34 years old, that is 28,07 percent in 1995 and 30,37 percent in 2003. Therefore, whether we see from education side or the age side, labor market in South Sumatera is not balanced. In a few years later, this condition is still predicted going on, but it is hoped there is other research for the next to solve the weakness found in calculating method demand for labor as it used the static coefficient and not calculated the price (wage) from labor yet.

### ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2003 tidak diikuti dengan terjadinya transformasi ketenagakerjaan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu ; masih dominannya tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian (lebih dari 50 persen ); rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dilihat dari proporsi jenjang pendidikan SD ke bawah; dan proporsi tenaga kerja *blue collar* dalam jumlah yang juga di atas 50 persen. Sementara itu, dari sisi penawaran jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan tingkat pendidikan SD ke bawah telah menurun pada tahun 2003 dibandingkan tahun 1995. Menurut jenis pekerjaan, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang negatif. Dengan demikian, baik ditinjau dari segi pendidikan maupun jenis pekerjaan, pasar tenaga kerja di Sumatera Selatan mengalami ketidakseimbangan, kecuali pada jenis pekerjaan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan dan tingkat pendidikan SD ke bawah. Dalam beberapa tahun ke depan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung, namun diharapkan ada penelitian lebih

<sup>1)</sup> Disarikan dari Tesis Magister

<sup>2)</sup> Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi PPS UNSRI

lanjut terutama dalam membuat perhitungan penawaran tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, sehingga perkiraan mengenai kondisi pasar kerja di Sumatera Selatan akan lebih akurat.

Kata-kata Kunci : Permintaan Tenaga Kerja, Penawaran Tenaga Kerja

## **PENDAHULUAN**

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil dalam pembangunan ekonomi. Kondisi perekonomian yang dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2000-an sangat berbeda dengan kondisi pada awal krisis. Krisis memberikan dampak yang luar biasa terhadap pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran (Smeru Indonesia, 1999). Setelah krisis, Sumatera Selatan berhasil membangun kembali ekonomi, hal ini dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Keberhasilan Sumatera Selatan dilihat pula dari pergeseran struktur ekonomi tahun 1993-2003. Sektor ekonomi lebih didominasi oleh sektor manufaktur dan jasa yang mempengaruhi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral. Hal ini menunjukkan telah terjadinya titik balik dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Tolok ukur ekonomi industri yang terpenting antara lain : sumbangan sektor manufaktur terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan sumbangan komoditi industri terhadap eksport barang dan jasa<sup>\*</sup>.

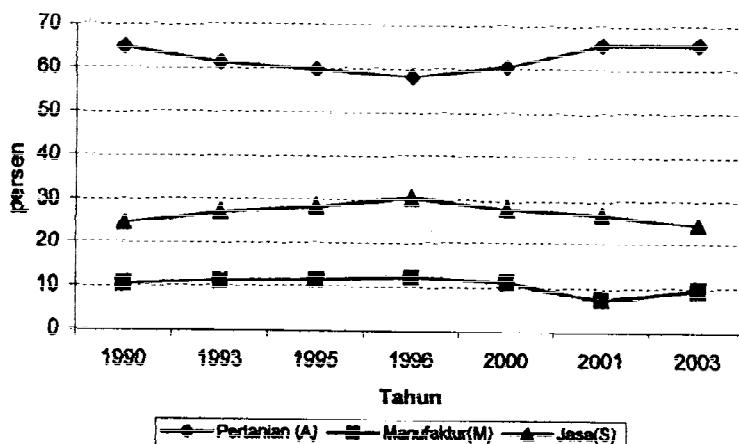
Sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB antara 18,77 persen sampai 20,68 persen dengan trend yang meningkat walaupun relatif kecil. Sementara sektor non pertanian (*manufaktur dan jasa*) memberikan kontribusi yang cukup besar, sekitar dua kali lipat dari sektor pertanian, yaitu 34,09 persen sampai 45,77 persen.

---

\* Menurut kriteria UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) negara atau perekonomian dikelompokkan sebagai berikut : (a) kelompok negara non industri apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10 persen; (b) kelompok negara dalam proses industrialisasi apabila sumbangan tersebut antara 10 – 20 persen; (c) kelompok negara semi industri jika sumbangan tersebut antara 20 – 30 persen dan (d) kelompok negara industri jika sumbangan tersebut lebih dari 30 persen. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita, besarnya tabungan domestik dan besarnya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (Arsyad, 1999:354).

Perubahan struktur penyerapan tenaga kerja biasanya merupakan konsekuensi lebih lanjut dari eksistensi perubahan struktural dalam ekonomi. Hill (dalam Sulistyaningsih, 1997: 5) berpendapat bahwa perubahan distribusi penyerapan tenaga kerja sektoral biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan peranan output secara sektoral, mengingat proses perpindahan tenaga kerja sangat lambat terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor dengan produktivitas rendah seperti sektor pertanian.

Lebih lanjut, menurut Manning (1995:59) sektor pertanian mempekerjakan hampir atau lebih dari separuh total angkatan kerja. Ini dibuktikan bahwa pada tahun 2003 proporsi tenaga kerja di sektor ini mencapai 66,03 persen. Gambar 1 menunjukkan bahwa kondisi setelah tahun 1997 adalah bentuk penyesuaian akibat adanya krisis yang melanda Indonesia sehingga justru terjadi pergeseran pekerjaan dari non pertanian ke sektor pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian dapat dianggap sebagai "sektor pengaman" dari besarnya angkatan kerja yang akan masuk dalam lapangan kerja. Sementara itu, penurunan daya serap terhadap tenaga kerja yang terjadi pada sektor non pertanian (manufaktur) sejalan dengan penurunan kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB dalam periode yang sama.



Gambar 1. Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sumatera Selatan 1990 – 2003

Dari kelompok penduduk yang termasuk angkatan kerja tidak semua dapat tertampung dalam kegiatan ekonomi karena masih banyak yang mencari

pekerjaan, ditunjukkan oleh besarnya angka pencari kerja dilihat dari rasionya terhadap jumlah angkatan kerja. Angka rasio ini (pengangguran) menunjukkan indikasi yang tinggi yaitu berkisar antara 5,03 – 8,97 persen. Dalam kurun waktu 1995 dan 1999 rasio ini berkurang 0,375 persen per tahun sedangkan tahun 2000 dan 2003 angka tersebut meningkat 0,87 persen per tahun.

Tabel 1  
Perubahan Agregat dalam Angkatan Kerja<sup>a</sup> di Sumatera Selatan 1995 – 2003

Uraian	Jumlah (Juta)				Kenaikan per tahun (%)		
	1995	1999	2000	2003	1995-99	1999-00	2000-03
Penduduk (15+)	4,39	4,97	5,33	4,46	0,14	0,38	-0,29
Angkatan Kerja	2,91	3,47	3,24	3,04	0,14	-0,23	-0,07
Menganggur	0,19	0,17	0,20	0,27	-0,0004	0,03	0,02
Bekerja	2,72	3,30	3,03	2,77	0,14	-0,26	-0,09
Bukan Angkatan Kerja	1,46	1,5	1,21	1,42	0,003	-0,29	0,07
Sekolah	0,36	0,33	0,49	0,36	-0,008	0,16	-0,04
Mengurus rumah tangga	0,91	0,44	0,52	0,88	-0,02	-0,32	0,12
Lainnya	0,21	0,33	0,20	0,18	0,03	-0,19	-0,006
Pengangguran <sup>b</sup>	8,53	5,03	6,31	8,97	-0,375	1,28	0,87

Sumber :BPS, diolah dari data SUSENAS 1999 dan 2003, SUPAS 1995, SP 2000

a. didefinisikan sebagai umur 15 tahun ke atas

b. persen dari angkatan kerja

Angkatan kerja yang mencari kerja dapat juga dikatakan sebagai pengangguran yang merupakan masalah besar dalam pasar tenaga kerja. Tabel 2 menyajikan beberapa karakteristik dari pengangguran di Sumatera Selatan.

Berdasarkan jenis kelamin, pengangguran yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan terdistribusi relatif sama banyaknya dalam tahun 1995 – 2003. Demikian pula apabila ditinjau dari lokasi kota dan desa, namun jika dilihat dari kondisi antara sudah atau tidak pernah bekerja sebelumnya, maka lebih dari separuh pengangguran termasuk yang tidak pernah bekerja sebelumnya artinya tidak pernah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan.

Jika didasarkan atas kelompok umur, pengangguran di Sumatera selatan banyak terjadi pada kelompok umur 15 – 24 tahun yaitu meliputi lebih dari 60 persen. Karakteristik pengangguran menurut tingkat pendidikan paling banyak berpendidikan SMA yaitu 38,5 – 51,7 persen.

Salah satu pendekatan atau model yang dapat diterapkan dalam perencanaan tenaga kerja adalah pendekatan kebutuhan tenaga kerja (Manpower Requirements Approach) yaitu suatu pendekatan untuk menduga permintaan dan

penawaran tenaga kerja dan keseimbangan antara keduanya di masa depan (Ananta, 1990:218). Cara dalam pemodelan ini telah diterapkan di Korea.

Tabel 2  
Karakteristik dari Pengangguran di Sumatera Selatan 1995 – 2003

Uraian	Jumlah (Ribu)				Proporsi (%)			
	1995	1999	2000	2003	1995	1999	2000	2003
Total Pengangguran 15 +	189,7	174,8	204,4	272,8	100	100	100	100
Laki-laki	88,9	88,9	112,9	138,3	48,9	56,6	55,2	49,96
Perempuan	100,8	75,7	91,5	136,5	53,1	43,4	44,8	50,34
Kota	95,8	118,3	101,9	130,2	50,5	67,8	49,9	47,8
Desa	93,9	56,3	102,5	142,6	49,5	32,2	50,1	52,2
Bekerja sebelumnya	26,8	61,8	57,9	46,2	14,1	35,4	28,3	16,9
Tidak pernah bekerja	162,9	112,8	146,5	226,6	85,9	64,6	71,7	83,1
15 - 19	68,2	67,6	67,4	75,8	35,95	38,7	32,97	27,8
20 - 24	72,5	77,5	78,8	87,6	38,2	44,4	38,6	32,1
25 - 29	28,7	32,5	33,4	37,7	15,1	18,6	16,3	13,8
30 +	20,3	23,9	24,8	71,7	10,7	13,7	12,1	26,3
TT SD / SD	80,1	43,7	68,3	78,9	42,2	25,0	33,4	29,2
SMP	38,2	29,1	40,7	71,1	20,1	16,7	19,9	26,1
SMA	72,0	90,3	83,2	107,8	38,5	51,7	40,7	39,5
PT	11,9	11,5	12,2	14,9	0,06	0,06	0,06	0,05

Sumber : BPS, diolah dari data SUSENAS 1999 dan 2003, SUPAS 1995, SP 2000

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana permintaan dan penawaran tenaga kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan di Sumatera Selatan dan bagaimana perkiraan pasar tenaga kerja di Sumatera Selatan tahun 2005-2010.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja sangat ditentukan oleh daya serap sektor-sektor ekonomi terhadap tenaga kerja. Model permintaan tenaga kerja ini menganggap adanya hubungan yang terjadi secara fungsional antara proses produksi dengan permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja dalam jumlah tertentu dan dengan tingkat kualitas tertentu yang dibutuhkan tersebut digunakan dalam rangka melaksanakan suatu proses produksi agar menghasilkan suatu besaran output tertentu. Dengan demikian hubungan yang terjadi secara fungsional tersebut dapat terjadi melalui suatu proses yang cukup rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga akan menimbulkan kesulitan di dalam menggunakan model permintaan tenaga kerja ini. Namun demikian, faktor-faktor tersebut dapat disederhanakan dengan hanya

memperhitungkan output sektoral ( $PDRB_j$ ) sehingga permintaan tenaga kerja secara fungsional dipengaruhi oleh  $PDRB_j$  sebagai berikut:

$$TK_{q,j} = f(PDRB_j) \quad (1)$$

dimana:

$q$  = jenis pekerjaan (okupasi)

$j$  = sektor ekonomi

$PDRB$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto (output)

$TK$  = Jumlah tenaga kerja yang diminta

Persamaan (1) memperlihatkan bahwa permintaan tenaga kerja bersifat *derived demand*. Permintaan tenaga kerja akan muncul bila output (dalam hal ini  $PDRB$ ) sektoral berkembang (Borjas, 2000:103). Model di atas juga hanya mengakomodir jenis pekerjaan dari tenaga kerja, tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Untuk menjelaskan permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, maka digunakan model Leontief. Model ini mengasumsikan jumlah modal adalah konstan sehingga model permintaan tenaga kerja yaitu (Sulistyaningsih, 1997: 71) :

$$X = \min (K, L_q) \quad (2)$$

dimana  $X$  adalah jumlah produksi,  $K$  adalah kapital dan  $L$  merupakan tenaga kerja dengan  $q = 1, 2, \dots, n$  yang merupakan berbagai jenis pekerjaan tenaga kerja bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja bukan merupakan faktor *homogenous* dari suatu fungsi produksi melainkan faktor yang *heterogen*, mengingat tenaga kerja bekerja pada berbagai jenis pekerjaan.

Hal yang sama terjadi pula untuk tingkat pendidikan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan tertentu mempunyai tingkat pendidikan tertentu. Rumus untuk menyatakan profil tenaga kerja bagi setiap tingkat pendidikan tenaga kerja dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X = \min [K, L_q(k_i)] \quad (3)$$

dimana  $k_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) menunjukkan berbagai jenjang pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja di setiap jenis pekerjaan.

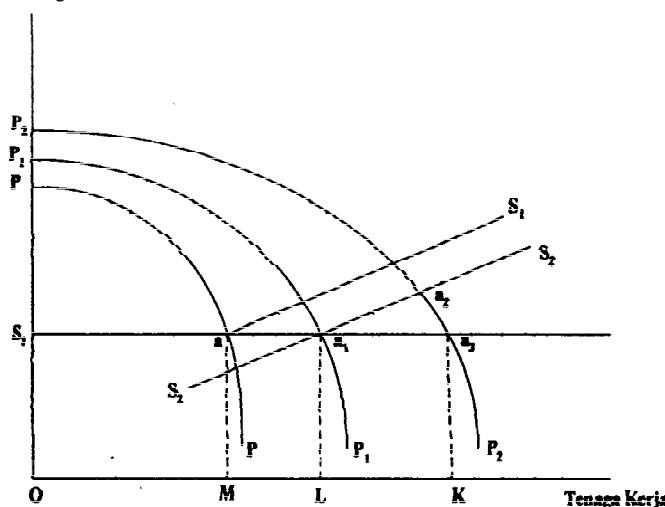
### Teori Penawaran Tenaga Kerja

#### Model Ranis-Fei

Kondisi kelebihan tenaga kerja (*labor surplus*) di sektor pertanian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan adanya dikotomi antara non pertanian dengan pertanian merupakan dua hal penting dalam model penawaran tenaga kerja di negara berkembang. Ranis-Fei menunjukkan interaksi antara kedua sektor tersebut di dalam mengawali dan mempercepat pembangunan. Model Ranis-Fei merupakan penyempurnaan dari model Lewis mengenai penawaran tenaga kerja yang berlebih dimana model Lewis mengabaikan pengembangan sektor pertanian dan memusatkan semata-mata pada sektor non pertanian (Jhingan, 1988: 283-285).

Ranis-Fei lebih jauh menunjukkan bahwa model mereka memenuhi persyaratan pertumbuhan berimbang. Hal ini dilukiskan dalam gambar 2 dimana PP adalah kurva permintaan awal tenaga kerja dan  $S_1S_1$  kurva penawaran awal tenaga kerja. Keduanya bertemu pada titik a dengan tenaga kerja sebanyak OM bekerja di sektor industri. Pada tingkat ini, sektor industri mendapatkan keuntungan yang sama dengan  $S_1aP$ . Keuntungan ini merupakan keseluruhan investasi yang tersedia bagi perekonomian. Sebagian dari dana ini dialokasikan ke sektor pertanian sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan menggeser kurva penawaran tenaga kerja di sektor industri dari  $S_1S_1$  ke  $S_2S_2$ .

**Output Marginal**



**Gambar 2.** Penawaran Tenaga Kerja menurut model Ranis-Fei  
Sumber : Jhingan, 1988:284

Sisa dari dana investasi itu dialokasikan ke sektor industri sehingga menggeser kurva permintaan industri dari PP ke  $P_1P_1$ . Kurva  $S_2S_2$  dan  $P_1P_1$  bertemu pada titik  $a_1$  yang terletak pada lintasan pertumbuhan berimbang  $S_1$  a<sub>3</sub>. Pada titik  $a_1$ , sektor industri menyerap tenaga kerja sebanyak ML yang telah dilepas oleh sektor pertanian sebagai akibat naiknya produktivitas pertanian setelah alokasi dana investasi ke sektor pertanian. Jadi, karena dana investasi terus dialokasikan ke dalam kedua sektor itu sepanjang waktu, perekonomian akan bergerak melalui jalur pertumbuhan berimbang. Namun, ada kemungkinan bahwa jalur pertumbuhan aktualnya menyimpang dari jalur pertumbuhan berimbang tersebut. Penyimpangan seperti itu akan mengundang hadirnya daya pengimbang yang cenderung mengembalikannya ke lintasan pertumbuhan berimbang tersebut. Lintasan aktual sebenarnya bisa berkisar di sekitar lintasan pertumbuhan berimbang. Misalnya, jika sebagai akibat dari investasi yang berlebihan di sektor industri, kurva permintaan tenaga kerja bergecer ke  $P_2P_2$  dan bersilangan dengan kurva penawaran tenaga kerja  $S_2S_2$  pada titik  $a_2$ , lintasan pertumbuhan aktual di atas lintasan pertumbuhan berimbang. Hal ini akan berakibat pada kelangkaan barang pertanian, menurunnya *terms of trade* dari sektor industri dan peningkatan upah di sektor ini sehingga tidak mendorong investasi di sektor industri dan mendorong investasi di sektor pertanian. Dengan demikian akan membawa kembali lintasan aktual ke lintasan pertumbuhan berimbang  $a_3$ .

#### *Angkatan Kerja*

Tenaga kerja yang termasuk angkatan kerja (Labor Force) adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun baik yang bekerja (Employed) maupun menganggur (Unemployed), sehingga dapat dituliskan sebagai berikut :

$$LF = E + U$$

dimana LF adalah labor force (angkatan kerja), E adalah employed dan U adalah unemployed. Besarnya jumlah angkatan kerja (labor force) ini tidak menyatakan mengenai intensitas kerja (Borjas, 2000:21), namun dapat menggambarkan jumlah penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah angkatan kerja.

### *Penelitian Terdahulu*

Sulistyaningsih (1997: 228-229) dalam penelitiannya mengenai dampak perubahan struktur ekonomi terhadap perubahan struktur penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan pendekatan input-output menyatakan bahwa meskipun belum ada pergeseran dominasi penyerapan tenaga kerja dalam ekonomi, tetapi terjadi perubahan peranan penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Peranan sektor pertanian menurun dalam penyerapan tenaga kerja dari 57,7 persen pada tahun 1980 menjadi 44,8 persen pada tahun 1993. Meskipun penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa pada periode 1980 sampai 1993 rata-rata meningkat, tetapi peningkatan peranan sektor ini belum dapat mengimbangi peranan sektor pertanian. Apabila diamati menurut distribusi jenis pekerjaan, maka tenaga kerja professional teknis dan tenaga kerja teknisi banyak terkonsentrasi di sektor jasa; tenaga kerja trampil banyak terkonsentrasi di sektor manufaktur dan tenaga kerja manajemen dan klerk terkonsentrasi di sektor pertanian.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat pula dilihat menurut pengelompokan sektor ekonomi menjadi non pertanian dan sektor pertanian seperti yang dilakukan Cohen dalam penelitiannya di Korea (Cohen, 1994 : 85) menggunakan model :

$$DEM_q = \sum \lambda_{qj} \cdot DEM_j$$

dimana :

- $DEM_q$  = permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q  
 $J$  = sektor ekonomi;  $j = 1$  (sektor non pertanian),  $j = 2$  (sektor pertanian)  
 $\lambda_{qj}$  = proporsi tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q yang terdapat pada sektor j

Temuannya memperlihatkan bahwa permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan selama tahun 1980-1990 menunjukkan tingkat pertumbuhan antara -2,0 persen (yang terjadi pada jenis pekerjaan tenaga pertanian) sampai 6,6 persen (yang terjadi pada permintaan tenaga kerja produksi). Adapun jenis pekerjaan lainnya berupa professional teknis, administrasi/klerk, tenaga penjualan dan tenaga jasa masing-masing mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,6 persen; 5,2 persen; 4,5 persen dan 4,6 persen.

Sementara itu, penawaran tenaga kerja menurut jenis pekerjaan ditentukan dengan persamaan :

$$SUP_{q\#} = \sum_k \lambda_{qk,0} \cdot SUP_k$$

dimana :

$SUP_{q\#}$  = penawaran tenaga kerja pada jenis pekerjaan q

$\lambda_{qk,0}$  = proporsi tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q pada tingkat pendidikan k, untuk periode terakhir

Cohen menemukan bahwa selama tahun 1980-1990 tingkat pertumbuhan penawaran tenaga kerja menurut jenis pekerjaan berkisar antara -2,7 sampai 7,0 persen per tahun yang terjadi pada kelompok pekerjaan pertanian dan tenaga profesional. Tenaga administrasi/klerk mengalami pertumbuhan 6,5 persen per tahun, tenaga penjualan 4,0 persen, tenaga produksi 5,8 persen dan tenaga jasa adalah 3,9 persen per tahun. Dengan demikian angka ketidakseimbangan pada jenis pekerjaan professional, administrasi/klerk, tenaga penjualan, tenaga pertanian, tenaga produksi dan jasa masing-masing adalah 41 persen; 34 persen; 6 persen; -26 persen; 1 persen; dan 9 persen sedangkan angka pengangguran pada tiap jenis pekerjaan tersebut masing-masing adalah 5 persen; 5 persen; 4 persen); 3 persen; 4 persen; 4 persen.

Selanjutnya dengan memasukkan unsur tingkat pendidikan maka Cohen mengembangkan model permintaan tenaga kerja menjadi :

$$DEM_{k\#} = \sum_q \lambda_{kq,0} \cdot DEM_q$$

dimana :

$DEM_{k\#}$  = permintaan tenaga kerja pada tingkat pendidikan k

$\lambda_{kq,0}$  = proporsi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan k pada jenis pekerjaan q

dan model penawaran tenaga kerja adalah :

$$SUP_{k-1} = SUP - \sum_k SUP_k$$

dimana :

$SUP_{k-1}$  = penawaran tenaga kerja yang tidak sekolah

$SUP$  = total penawaran angkatan kerja

$SUP_k$  = penawaran tenaga kerja pada tingkat pendidikan k

Hasil analisisnya memperlihatkan hal sebagai berikut, pertama; tingkat pertumbuhan permintaan tenaga kerja selama tahun 1980-1990 adalah -0,2 persen untuk tenaga kerja yang tidak sekolah; 2,4 persen untuk tenaga kerja berpendidikan dasar; 4,5 persen bagi tenaga kerja dengan pendidikan menengah; terakhir tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi adalah 4,9 persen.

Kedua; selama periode 1980-1990 tingkat pertumbuhan penawaran tenaga kerja pada tingkat pendidikan tinggi, menengah, dasar dan tidak sekolah masing-masing adalah 9,1 persen; 4,2 persen; 0,4 persen; dan -1,2 persen per tahun. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa berdasarkan pendidikan terjadi angka ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja bagi masing-masing tingkat pendidikan dari yang tinggi ke pendidikan dasar yaitu 52 persen; 24 persen; -31 persen dan -52 persen, sedangkan angka penganggurnya masing-masing adalah 5 persen; 4 persen; 3 persen; dan 2 persen.

Studi yang dilakukan oleh Depdikbud (1994) menganalisis kemampuan lulusan D3 dan S1 dari 10 universitas negeri di Indonesia yang menjadi sampel studi untuk berkompetisi di pasar kerja (aspek penawaran). Selain itu studi tersebut juga menganalisis kondisi perusahaan sebagai pengguna para lulusan D3 dan S1 (aspek permintaan). Tingkat pengangguran untuk lulusan D3 dan S1 dari hasil studi ini cukup tinggi mencapai 12 persen.

Studi pelacakan lulusan perguruan tinggi memberi indikasi bahwa tingkat lulusan perguruan tinggi di Sulawesi mempunyai kemungkinan untuk menganggur yang relatif tinggi dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi di Jawa. Kondisi ini adalah sebagai akibat adanya pertumbuhan dan pembangunan yang dilaksanakan swasta relatif lebih tinggi di Jawa dibandingkan di Sulawesi. Sementara itu, para pengusaha biasanya merekrut tenaga kerja di daerah sekitar usahanya perguruan tinggi setempat).

Penelitian Swasono dan Sulistyaningsih (1996) mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia dengan penekanan pada tenaga kerja terdidik (SMA ke atas) menemukan bahwa tingkat pengangguran untuk tenaga kerja terdidik relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran untuk tenaga kerja tidak terdidik. Sejak tahun 1986 sampai tahun 1993 rasio tersebut berkisar antara 1:4 (tahun 1990) dan 1:10 (tahun 1988).

Proporsi pencari kerja lulusan SMA mendominasi struktur pencari kerja terdidik di pasar kerja sepanjang periode 1986 – 1993, yaitu antara 87 persen sampai 92 persen. Pencari kerja terdidik lulusan perguruan tinggi meskipun proporsinya relatif kecil tetapi jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun (8 persen sampai 15 persen).

#### METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini dibatasi pada analisa mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam tahun 1995 dan 2003 kemudian perkiraannya dalam tahun 2005-2010. Dari perhitungan permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut dapat dijabarkan menjadi kondisi pasar tenaga kerja menurut sektor ekonomi, pendidikan dan kelompok umur dengan menggunakan matriks kesempatan kerja menurut jenis pekerjaan (q), kotor (j) dan pendidikan (k).

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Adapun data tersebut berupa empat set data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan bersumber dari : (1) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor usaha Provinsi Sumatera Selatan tahun 1995 dan 2003 berdasarkan angka konstan 1993 ; (2) Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 1995 ; (3) Sensus Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2000 dan (4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003.

#### *Metode Analisis*

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan hasil pengolahan data dengan menggunakan model permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Formulasi model ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Cohen (1994) berupa persamaan sebagai berikut :

$$DEM_1 = \lambda_1 \cdot PDRB_1 \quad (4)$$

$$DEM_2 = (1 - \mu) SUP - DEM_1 \quad (5)$$

dimana :

$DEM_1, DEM_2$  = permintaan tenaga kerja di sektor non pertanian dan pertanian  
 $\lambda_1$  = tingkat input tenaga kerja per unit PDRB pada sektor non pertanian

$PDRB_1$  = Produk Domestik Regional Bruto di sektor non pertanian

$SUP$  = total penawaran angkatan kerja

$\mu$  = tingkat pengangguran terbuka

ada persamaan (4) terlihat bahwa sifat dari permintaan tenaga kerja di sektor non pertanian adalah *derived demand* karena pada sektor ini tenaga kerja yang diserap sangat tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Di sektor

pertanian tenaga kerja lebih mudah untuk masuk ke sektor tersebut, tidak tergantung pada output yang dihasilkan. Dengan demikian permintaan tenaga kerja merupakan selisih antara angkatan kerja dengan pengangguran terbuka yang diinteraksikan dengan total penawaran angkatan kerja seperti yang tampak pada persamaan (5).

Persamaan berikut ini mengkonversikan permintaan tenaga kerja menurut sektor j ke dalam permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q.

$$DEM_q = \sum_j \lambda_{qj} \cdot DEM_j \quad (6)$$

dimana :

- $DEM_q$  = permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q  
 $J$  = sektor ekonomi;  $j = 1$  (sektor non pertanian),  $j = 2$  (sektor pertanian)  
 $\lambda_{qj}$  = proporsi tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q yang terdapat pada sektor j

$\lambda_{qj}$  adalah koefisien dari tabulasi silang jumlah tenaga kerja menurut jenis pekerjaan q dan sektor j berupa matrik jenis pekerjaan dan sektor (IOM) dari  $q \times j$  order matriks.

Kemudian, untuk menghitung permintaan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan digunakan persamaan yaitu :

$$DEM_{kq} = \sum_q \lambda_{kq} \cdot DEM_q \quad (7)$$

dimana :

- $DEM_{kq}$  = permintaan tenaga kerja pada tingkat pendidikan k  
 $\lambda_{kq}$  = proporsi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan k pada jenis pekerjaan q

$\lambda_{kq}$  berasal dari matrik jenis pekerjaan dan pendidikan (EOM) dari  $k \times q$  order matriks.

Tenaga kerja yang diminta dikelompokkan menurut umur dinyatakan dengan  $DEM_a$  untuk  $a = 2, 3, 4, 5$  (kelompok umur 25 – 34; 35 – 44; 45-54 tahun dan 55 – 64 tahun). Perhitungan permintaan tenaga kerja menurut kelompok umur digunakan persamaan:

$$DEM_{a=1} = DEM - \sum_a DEM_a \quad (8)$$

dimana:

- $DEM_{a=1}$  = permintaan tenaga kerja pada kelompok umur 15 – 24 tahun  
 $DEM$  = total permintaan tenaga kerja  
 $DEM_a$  = permintaan tenaga kerja pada kelompok umur a

Angkatan kerja dibedakan menurut tingkat pendidikan dinyatakan sebagai  $SUP_k$  untuk  $k = 2, 3, 4$  (tingkat pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi). Dalam persamaan selanjutnya dapat dihitung angkatan kerja yang tidak/belum dan tamat SD dinyatakan dengan  $SUP_{k=1}$ , yaitu :

$$SUP_{k=1} = SUP - \sum_k SUP_k \quad (9)$$

dimana :

$SUP_{k=1}$  = penawaran tenaga kerja yang tidak/belum dan tamat SD

$SUP$  = total penawaran angkatan kerja

$SUP_k$  = penawaran tenaga kerja pada tingkat pendidikan k

Untuk menggambarkan penawaran tenaga kerja menurut kelompok umur 15 – 24 tahun yang dinyatakan dengan  $SUP_{a=1}$  digunakan persamaan (10)

$$SUP_{a=1} = SUP - \sum_a SUP_a \quad (10)$$

dimana :

$SUP_{a=1}$  = penawaran tenaga kerja pada kelompok umur 15 – 24 tahun

$SUP$  = total penawaran angkatan kerja

$SUP_a$  = penawaran tenaga kerja pada kelompok umur a

#### Batasan Operasional Variabel

1. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja ( 15 – 64 tahun ).
2. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam rupiah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam sektor pertanian di wilayah provinsi Sumatera Selatan yang dihitung menggunakan harga konstan tahun 1993.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor non pertanian adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam rupiah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam sektor non pertanian (manufaktur dan jasa) di wilayah provinsi Sumatera Selatan yang dihitung menggunakan harga konstan tahun 1993.
5. Tingkat pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang dibagi menjadi empat jenjang yaitu : (1) tidak/belum dan tamat SD; (2) SMP; (3) SMA; dan (4) Perguruan Tinggi.
6. Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja terdiri dari : (0/1) Tenaga Profesional, teknisi dan yang sejenis; (2) Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan; (3) Tenaga Tata Usaha dan yang

- sejenis; (4) Tenaga usaha penjualan; (5) Tenaga usaha jasa; (6) Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; (7/8/9) Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar.
7. **Permintaan tenaga kerja** adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian dengan berbagai jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan kelompok umur.
  8. **Penawaran tenaga kerja** adalah jumlah angkatan kerja pada berbagai tingkat pendidikan dan kelompok umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Permintaan Tenaga Kerja Menurut Sektor*

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa (lihat juga lampiran 1 dan gambar 2) terlihat bahwa peningkatan hasil sektor pertanian dalam struktur produksi juga diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja dengan laju peningkatan yang relatif sama. Kontribusi sektor pertanian dalam ketenagakerjaan tahun 1995 dan 2003 telah meningkat dari 58,88 persen menjadi 66,03 persen. Dengan kata lain permintaan tenaga kerja oleh sektor pertanian selama periode tersebut meningkat sebesar 6,18 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen per tahun, sedangkan dalam struktur produksinya meningkat sebesar 1,12 persen atau tumbuh sebesar 1,52 persen per tahun.

**Tabel 3**  
**Permintaan Tenaga Kerja Menurut Sektor (DEM<sub>t</sub>) dan PDRB Sumatera Selatan**  
**Tahun 1995 dan 2003**

No	Sektor	DEM <sub>t</sub>		PDRB (juta Rn)		Perubahan (%)	
		1995	2003	1995	2003	DEM <sub>t</sub>	PDRB
1	Pertanian	1.600.906	1.826.473	2.448.449	2.761.666	1,66	1,52
2	Industri Pengolahan	145.827	127.321	2.575.067	2.799.270	-1,68	1,05
3	Rumah Tangga	10.253	112.651	973.705	808.997	0,35	-2,29
4	Pedagangan, Hotel dan Restoran	113.010	349.749	2.214.940	2.618.079	15,13	2,11
5	Administrasi, Perdagangan dan Komunikasi	359.820	112.375	629.553	744.481	-13,54	2,12
6	Kewarganegaraan	94.963	11.902	678.276	519.482	-22,86	-3,28
7	Jasa Penyediaan dan Kesiapan Makanan	329.901	201.776	912.131	910.687	-5,96	-0,02
8	Pertambangan/Penggalian, Listrik, Air dan Gas	64.314	25.741	2.083.590	2.190.170	-10,8	0,63
	<i>Jumlah Non Pertanian</i>	1.118.068	940.515	10.087.262	10.591.146	-4,14	0,54
	<b>Jumlah</b>	<b>2.718.094</b>	<b>2.766.988</b>	<b>12.515.761</b>	<b>13.352.812</b>	<b>0,32</b>	<b>0,81</b>

Berbeda dengan sektor pertanian, maka pada sektor non pertanian penurunan kontribusi non pertanian dalam produksi lebih lambat bila

dibandingkan dengan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi non pertanian dalam penyerapan tenaga kerja menurun dari 41,91 persen menjadi 33,98 persen masing-masing pada tahun 1995 dan 2003. Sementara itu kontribusi non pertanian dalam struktur produksi untuk tahun yang sama berkurang dari 80,44 persen menjadi 79,32 persen. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja dalam sektor non pertanian berkurang 2,14 persen per tahun sedangkan hasil dalam produksinya mengalami pertumbuhan 0,64 persen per tahun.

Apabila diperhatikan lebih terperinci dalam permintaan tenaga kerja di sektor non pertanian, terdapat suatu hal yang luar biasa pada sub sektor bangunan. Sub sektor ini mengalami pertumbuhan permintaan tenaga kerja 0,35 persen per tahun. Hal ini terkait dengan banyaknya kesempatan kerja yang bersifat padat karya seperti penyiapan lahan, konstruksi gedung dan bangunan sipil, instalasi gedung dan bangunan sipil, penyelesaian konstruksi gedung dan penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/penghancur bangunan dengan operatornya (BPS, 2000). Walaupun nilai output dari subsektor bangunan dalam PDRB justru mengalami pertumbuhan yang negatif, namun kontribusinya menunjukkan trend yang meningkat.

Sektor non pertanian lain yang pertumbuhan permintaan kerjanya juga positif adalah perdagangan, hotel dan restoran. Keadaan ini sejalan dengan pertumbuhan subsektor tersebut dalam PDRB, bahkan seperlima dari pembentukan PDRB disumbangkan oleh subsektor ini. Lapangan usaha yang terdapat dalam sektor non pertanian seperti perdagangan, hotel dan restoran adalah : (1) penjualan, pemeliharaan dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan; (2) perdagangan besar dalam negeri, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor; (3) perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga; (4) perdagangan ekspor, kecuali mobil dan sepeda motor; (5) perdagangan impor, kecuali mobil dan sepeda motor; dan (6) penyediaan akomodasi dan makan minum (BPS, 2000). Luasnya bidang usaha seperti disebutkan di atas adalah faktor yang menyebabkan permintaan tenaga kerja pada sektor ini tumbuh dengan pesat.

Adapun sektor keuangan adalah subsektor dalam sektor non pertanian yang paling lambat pertumbuhannya, yaitu -22,86 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya nilai output sektor ini selama periode 1995 – 2003 dalam

pembentukan PDRB dengan tingkat pertumbuhan -3,28 persen per tahun. Selain itu sektor ini bersifat padat modal sehingga permintaan terhadap tenaga kerja sangat kecil.

Secara keseluruhan, sektor non pertanian dengan pertumbuhan PDRB sebesar 0,64 persen per tahun selama periode 1995 – 2003 tidak diikuti dengan hal yang sama dalam permintaan tenaga kerja, yaitu -2,14 persen per tahun. Artinya terjadinya peningkatan dalam nilai output sektor tersebut justru mengurangi permintaan tenaga kerja dalam sektor yang bersangkutan. Keadaan ini disebabkan karena sektor non pertanian khususnya industri pengolahan di Sumatera Selatan yang terutama adalah industri minyak yang bersifat padat modal. Apabila dibandingkan dengan sektor pertanian, maka provinsi Sumatera Selatan belum mengalami transformasi tenaga kerja secara sektoral bahkan sektor pertanian masih mendominasi dalam permintaan tenaga kerja.

#### *Permintaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan*

Salah satu indikator tentang transformasi permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan tercermin antara lain pada perkembangan permintaan tenaga kerja *blue collar*. Tenaga kerja *blue collar* dapat didekati dari perkembangan jenis pekerjaan yaitu tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan ditambah dengan tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar lainnya.

Tabel 4  
Permintaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan ( $DEM_q$ ) di Sumatera Selatan Tahun 1995 dan 2003

Kode	Jenis Pekerjaan	1995		2003	
		Pertanian	Non Pertanian	Pertanian	Non Pertanian
01	Tenaga profesional/teknisi dan yang sejenis	1.073	129.612	932	40.214
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatlaksanaan	16	2.721	37	3.817
3	Tenaga Talo Usaha dan yang sejenis	977	94.589	712	55.004
4	Tenaga usaha penjualan	3.346	155.927	3.196	335.688
5	Tenaga usaha jasa	929	111.662	712	54.806
6	Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	1.590.118	44.085	1.816.002	99.757
2003	Tenaga usaha produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar lainnya	4.435	660.149	4.000	359.229
	Jumlah	1.600.890	1.199.748	1.826.491	940.515

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4 terlihat peningkatan yang terjadi pada jenis pekerjaan *tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan* dikarenakan adanya *pearyesuaian* akibat krisis ekonomi. Tenaga kerja beralih kepada jenis pekerjaan *yang memang sangat mudah untuk dimasuki oleh tenaga kerja tanpa memerlukan*

ketrampilan yang tinggi dan bersifat informal. Namun demikian dalam periode 1995 dan 2003 telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja *blue collar* sebesar 27.897 orang akan tetapi proporsi tenaga kerja *blue collar* dalam permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan pada kedua periode tersebut tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 82,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terjadi transformasi permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan.

Berdasarkan sektor, maka yang terjadi dalam perekonomian juga terjadi pada sektor pertanian yaitu sangat besarnya persentase tenaga kerja *blue collar* terutama tenaga kerja dengan jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang meliputi 99,23 persen dan 99,48 persen dari seluruh permintaan tenaga kerja pada tahun 1995 dan 2003 dalam sektor tersebut. Adapun sektor non pertanian, proporsi terbesar dalam permintaan tenaga kerjanya dalam tahun yang sama terjadi pada jenis pekerjaan tenaga usaha produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar lainnya yaitu masing-masing sebesar 55,02 persen dan 38,19 persen. Dengan demikian, pada sektor pertanian jenis pekerjaan *blue collar* yang paling dominan adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sedangkan pada sektor non pertanian didominasi oleh tenaga usaha produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar lainnya.

Jumlah permintaan tenaga kerja dalam perekonomian tahun 2003 menurut jenis pekerjaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1995 karena kenaikan yang terjadi dalam permintaan tenaga kerja pada tahun 2003 di sektor pertanian dilikuti dengan penurunan yang sangat besar dalam permintaan di sektor non pertanian, terutama pada jenis pekerjaan tenaga usaha produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar lainnya karena sektor non pertanian semakin bersifat padat modal, sehingga secara keseluruhan permintaan tenaga kerja menjadi berkurang.

#### *Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan*

Pada tahun 1995, permintaan tenaga kerja berpendidikan SD kebawah adalah 1.981.321 orang atau 70,74 persen dari seluruh tenaga kerja yang bekerja, berpendidikan menengah (SMP dan SMA) adalah 751.402 orang atau 26,83 persen dan 67.915 orang atau 2,43 persen berpendidikan tinggi. Angka ini

menjadi 88,10 persen untuk tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah pada tahun 2003, berpendidikan menengah 11,46 persen dan 0,44 persen berpendidikan tinggi.

Tabel 5  
Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ( $DEM_{k#}$ ) di Sumatera Selatan  
Tahun 1995 dan 2003

Pendidikan	1995			2003			Perkembahan (%)
	Total	Pertanian	Non pertanian	Total	Pertanian	Non Pertanian	
Tidak Tamat SD/SD	1.981.324	1.374.007	607.317	2.437.761	1.726.047	711.714	2,83
SMP	351.847	159.473	192.374	166.885	77.304	89.581	-8,91
SMA	399.559	64.189	335.370	150.191	22.179	127.472	-11,51
PT	67.915	3.223	64.692	12.165	421	11.744	-19,34
Jumlah	2.800.638	1.600.892	1.199.753	2.767.006	1.826.491	940.511	-0,15

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa hanya tingkat pendidikan tenaga kerja SD kebawah yang mengalami pertumbuhan positif dalam periode 1995 – 2003, sedangkan jenjang pendidikan tenaga kerja lainnya mengalami hal yang sebaliknya. Bahkan secara keseluruhan permintaan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan sama seperti dalam permintaan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan yaitu berkurang 0,15 persen per tahun.

Proporsi yang dominan dalam permintaan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah terjadi baik pada sektor pertanian maupun non pertanian. Pada tahun 1995 masing-masing sektor menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD / SD adalah 85,83 persen dan 50,62 persen. Sedangkan pada tahun 2003 adalah 94,50 persen dan 75,67 persen. Besarnya proporsi tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian dengan pendidikan SD ke bawah ini tidak terlepas dari kondisi bahwa pekerjaan yang ada pada sektor tersebut lazimnya tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi. Sementara itu, sektor non pertanian mengalami besarnya dominasi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah disebabkan karena luasnya lapangan usaha pada sektor bangunan dan perdagangan dengan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah.

Pertumbuhan negatif yang terjadi pada permintaan tenaga kerja berpendidikan di atas SD sejalan dengan kondisi masih besarnya proporsi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu bahwa sektor pertanian di Sumatera Selatan biasanya mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah karena masih

bersifat tradisional dan diduga karena faktor dari tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi itu sendiri tidak mau bekerja di sektor pertanian. Hal ini semakin memperkuat kenyataan bahwa di Sumatera Selatan belum terjadi transformasi permintaan tenaga kerja.

*Permintaan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur*

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa permintaan tenaga kerja berumur 25-34 tahun pada tahun 1995 dan 2003 meliputi proporsi terbesar yaitu masing-masing 28,07 persen dan 30,37 persen.

Tabel 6  
Permintaan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur (DEM<sub>g</sub>) di Sumatera Selatan  
Tahun 1995 dan 2003

Kelompok Umur	1995	2003	Pertumbuhan (%)
15 – 24 tahun	589.729	499.891	-0,02
25 – 34 tahun	786.240	840.265	0,008
35 – 44 tahun	705.297	746.988	0,007
45 – 54 tahun	357.473	368.521	0,004
55 – 64 tahun	361.899	311.341	-0,019
Jumlah	2.800.638	2.767.006	-0,15

Sumber : Data diolah

Kenaikan proporsi permintaan tersebut diduga karena pada kelompok umur ini tenaga kerja telah menyelesaikan pendidikannya, setidaknya SMA dan perguruan tinggi. Hal ini terkait pula dengan besarnya proporsi tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi dari SD yang diminta pada sektor non pertanian. Selain itu diduga juga jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan, misalnya pramuniaga dan tenaga penjualan lainnya paling banyak termasuk dalam kelompok umur ini.

*Penawaran Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan*

Pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja berpendidikan tidak tamat SD / SD secara proporsional meliputi 69,34 persen pada tahun 1995 dan 55,67 persen pada tahun 2003. Dengan kata lain proporsinya berkurang 13,67 persen, namun tetap merupakan bagian terbesar dalam penawaran tenaga kerja menurut tingkat pendidikan.

**Tabel 7**  
**Penawaran Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (SUP<sub>k</sub>) di Sumatera Selatan**  
**Tahun 1995 dan 2003**

Tingkat Pendidikan	1995	2003	Pertumbuhan (%)
Tidak Tamat SD / SD	2.070.387	1.692.842	-2,49
SMP	384.586	692.832	7,64
SMA	456.747	548.212	2,31
PT	74.011	106.960	4,71
Jumlah	2.985.731	3.040.646	0,230

Sumber : Data diolah

Kelompok tenaga kerja yang paling besar tingkat pertumbuhannya dalam periode 1995 – 2003 yaitu 7,64 persen per tahun. Hal ini ada kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMP. Adapun proporsi penawaran tenaga kerja berpendidikan SMP adalah 22,79 persen pada tahun 2003 atau meningkat hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 1995.

#### *Penawaran Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur*

Tabel 8 di bawah ini menyajikan jumlah penawaran tenaga kerja menurut kelompok umur dengan persamaan tersebut

**Tabel 8**  
**Penawaran tenaga kerja menurut kelompok umur (SUP<sub>a</sub>) di Sumatera Selatan**  
**Tahun 1995 dan 2003**

Kelompok Umur	1995	2003	Pertumbuhan (%)
15 – 24 tahun	730.468	672.805	-0,01
25 – 34 tahun	823.161	883.000	0,009
35 – 44 tahun	712.428	773.581	0,91
45 – 54 tahun	360.640	371.233	0,004
55 – 64 tahun	359.034	340.027	-0,007
Jumlah	2.985.731	3.040.646	0,230

Sumber : Data diolah

Tabel 8 tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif pada kelompok umur 15-24 tahun yang disebabkan oleh hal yang sama seperti pada permintaan tenaga kerja menurut kelompok umur, yaitu karena diduga tenaga kerja lebih banyak yang meneruskan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi melalui pendidikan formal atau mengikuti pendidikan yang bersifat informal seperti kursus atau pelatihan. Hal ini dapat pula disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang menawarkan dirinya keluar dari Sumatera Selatan atau migrasi ke daerah lain. Sementara itu pada kelompok umur 55-64 tahun pertumbuhan negatif yang terjadi adalah karena faktor lain dalam kependudukan yaitu kematian atau tenaga